



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIANTA BANGUN**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO UMUM**
3. NHK : **164109**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 905.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/199 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 375.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI LJ 80 V SUZUKI KATANA Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 199.829.800****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 868.343.889****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.348.173.689**

III. HUTANG **Rp. 59.287.500**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.288.886.189

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.